

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memahami fungsi dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi sangat penting mengingat dinamika politik di Indonesia, terutama bagi kalangan generasi muda. Namun pada kenyataannya, edukasi mengenai tugas, fungsi, dan mekanisme kerja DPR RI masih tergolong rendah, sehingga berdampak pada munculnya sikap skeptis generasi muda terhadap politik dan proses demokrasi.

Rendahnya minat politik di kalangan generasi muda berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap proses regenerasi politik serta kualitas partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi. Sikap skeptis tersebut semakin diperkuat oleh terbatasnya akses informasi yang memadai terkait peran dan kinerja DPR RI. Berdasarkan data survei CSIS 2022 (*Center for Strategic and International Studies*), mencatat bahwa tingkat keterlibatan aktif generasi muda dalam partai politik maupun organisasi politik masih sangat kecil, yakni sekitar 1,1%. Apabila kondisi ini tidak segera mendapat perhatian, maka citra DPR RI sebagai lembaga negara dapat semakin melemah di mata publik (Hasya, 2022).

Trisiana dan Yulianto (2024) menjelaskan bahwa meskipun generasi muda saat ini memiliki kemudahan dalam mengakses informasi politik melalui media sosial, hal tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi mereka dalam aktivitas politik secara langsung. Minimnya pemahaman politik dan kurang terbukanya lembaga legislatif justru membuat

sebagian besar generasi muda bersikap acuh, hingga meragukan kemampuan DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif.

Melihat data di atas Humas Setjen DPR RI berperan penting dalam memperbaiki citra lembaga melalui komunikasi yang efektif dan publikasi kinerja DPR. Berdasarkan Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 terkait Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, tugas dan fungsi bagian Humas dan Pengelolaan Museum adalah menerima kunjungan masyarakat, penyaluran delegasi masyarakat, promosi, diseminasi, dan edukasi publik, serta pengelolaan Museum DPR RI. Berbagai fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk program unggulan yang bernama “Kunjungan Edukasi Parlemen (EduPar)” dan juga menjadi esensi utama Humas dan Pengelolaan Museum DPR RI yaitu mengedukasi masyarakat tentang Keparlemenan (Portal humas.dpr.go.id, 2024).

Filosofi Humas dan Pengelolaan Museum DPR RI dalam membuat Program Kunjungan Edukasi Parlemen adalah untuk mendekatkan DPR kepada masyarakat melalui penyediaan informasi yang transparan, edukatif, dan menarik mengenai peran serta fungsi DPR dalam sistem demokrasi. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang keparlemenan kepada publik guna meningkatkan pemahaman mengenai parlemen khususnya DPR RI dan mengajak untuk berpartisipasi aktif didalamnya terutama kalangan generasi muda.

Program ini mencakup berbagai kegiatan edukatif yang dipandu langsung oleh Humas dan Pengelolaan Museum DPR RI. Program ini dikemas dalam konsep *Edutainment (education plus entertainment)*, sehingga rangkaian kegiatan dibuat semenarik mungkin dan melibatkan partisipasi peserta dalam proses pembelajaran. Menariknya lagi, kegiatan ini juga akan mendatangkan perwakilan anggota DPR

RI, sehingga orang-orang yang hadir dapat merasakan pengalaman langsung bertemu dan berbicara dengan anggota DPR RI (Habibi, 2024).

Kegiatan Kunjungan Edukasi Parlemen dilakukan *one day* dengan dua sesi. Sesi pertama diawali dengan pemaparan mengenai mekanisme kerja DPR RI dan diskusi yang akan dilakukan di Ruang Abdul Muis (*Operation Room*). Sesi kedua peserta akan diajak melakukan *tour building* ke Museum DPR RI yang dipandu oleh Pamong budaya DPR RI dan mengunjungi Ruang Sidang Paripurna dimana selama melakukan *tour building* masyarakat yang berkunjung juga akan mendapatkan pemaparan mengenai sejarah DPR RI, sejarah gedung, hiasan yang terdapat di DPR RI, dan lain sebagainya (Portal humas.dpr.go.id, 2024).

Berdasarkan pernyataan Humas dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI melalui wawancara, keberlanjutan Program Kunjungan Edukasi Parlemen DPR RI didukung oleh inovasi dalam metode penyampaian informasi dengan memaksimalkan media sosial. Selain itu, komitmen Humas dan Pengelolaan Museum DPR RI untuk terus memperbaharui konten dan menyesuaikan program dengan perkembangan zaman, memastikan program ini tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang sehingga dapat terus mengedukasi generasi muda terkait keparlemen. Hal inilah yang menjadi motif Humas dan Pengelolaan Museum DPR RI untuk menjaga dan mempertahankan Program Kunjungan Edukasi Parlemen hingga saat ini.

Program Kunjungan Edukasi Parlemen sendiri terbuka untuk seluruh golongan masyarakat baik secara grup/kelompok seperti kelompok sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Universitas serta umum baik dari organisasi ataupun

instansi. Akan tetapi program ini lebih banyak diikuti oleh kalangan pelajar ataupun mahasiswa. Berdasarkan data kunjungan Edukasi Parlemen, tercatat sebanyak 192 sekolah dan 25 Instansi/Organisasi yang mengikuti Program Kunjungan Edukasi Parlemen periode tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah meningkat menjadi 201 sekolah dan 17 Instansi/Organisasi (Laporan Tahunan Kunjungan Edukasi Parlemen, 2023-2024). Pada akhirnya, penulis tertarik mengangkat permasalahan terkait Program Kunjungan Edukasi Parlemen sebab program ini memiliki latar belakang yang kuat sebagai upaya untuk meningkatkan edukasi politik bagi generasi muda dan sebagai metode yang dapat diimplementasikan oleh DPR RI untuk memperbaiki dan meningkatkan citranya.

Fungsi dan tugas Humas dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI, sebagaimana disampaikan oleh Ishak (2012), mencakup peran sebagai komunikator, fungsi manajemen, penyusunan program, perancangan berbagai naskah komunikasi, pembangunan hubungan antara manajemen dan karyawan, pemecahan masalah, serta pembentukan citra organisasi. Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut, aktivitas komunikasi Humas dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI diwujudkan melalui berbagai bentuk sosialisasi program edukatif kepada publik. Salah satu bentuk implementasi fungsi tersebut adalah pelaksanaan sosialisasi Program Kunjungan Edukasi Parlemen, yang bertujuan menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke DPR RI serta memberikan pengetahuan dan pengalaman terkait keparlemenan, khususnya mengenai tugas dan fungsi DPR RI (Laporan Tahunan Kunjungan Edukasi Parlemen, 2024).

Dalam pelaksanaannya, aktivitas komunikasi Humas dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI dalam menyosialisasikan Program Kunjungan Edukasi

Parlemen dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi. Salah satu saluran yang digunakan adalah media sosial, seperti Instagram @edukasiparlemen dan YouTube @edukasiparlemen yang dimanfaatkan sebagai media penyebaran informasi, dokumentasi kegiatan, serta sarana komunikasi dengan publik (Laporan Tahunan Kunjungan Edukasi Parlemen, 2024). Pemanfaatan media sosial tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mendukung penyebaran informasi program secara cepat dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi dan riset peneliti, aktivitas sosialisasi Program Kunjungan Edukasi Parlemen melalui media sosial belum sepenuhnya menjangkau khalayak yang beragam dan masih menunjukkan tingkat interaksi publik yang relatif terbatas. Selain itu, konten yang disajikan pada platform *Instagram* dan *YouTube* Edukasi Parlemen cenderung menonjolkan informasi dan promosi kelembagaan DPR RI dibandingkan dengan penyampaian informasi yang komprehensif mengenai tujuan, mekanisme, serta manfaat Program Kunjungan Edukasi Parlemen bagi peserta (Instagram @edukasiparlemen, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi yang dilakukan masih memiliki tantangan dalam mengoptimalkan penyampaian pesan edukatif yang berorientasi pada kebutuhan audiens.

Pemanfaatan media sosial sebagai salah satu saluran utama sosialisasi juga menghadirkan tantangan tersendiri. Tidak seluruh lapisan masyarakat memiliki akses dan tingkat partisipasi yang sama terhadap media sosial, khususnya masyarakat dan lembaga pendidikan di wilayah terpencil yang belum terhubung secara optimal dengan teknologi digital. Berdasarkan data *insight* akun *Instagram* resmi @edukasiparlemen periode 2024–2025, audiens terbesar program ini berasal

dari wilayah Pulau Jawa. Lima kota teratas yang paling banyak mengakses atau terjangkau oleh konten Edukasi Parlemen seluruhnya berada di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung, dan Depok. Meskipun persentasenya dapat berubah sewaktu-waktu, pola ini menunjukkan konsistensi dominasi wilayah Jawa sebagai pusat jangkauan audiens pada Program (*Insight Instagram @edukasiparlemen*).

Ketimpangan jangkauan program ini juga diperkuat oleh data yang tercantum dalam Laporan Tahunan Edukasi Parlemen Tahun 2024 serta hasil Rekapitulasi Kunjungan Edukasi Parlemen pada periode yang sama. Dari total 220 lembaga dan 24.546 peserta, sebagian besar berasal dari wilayah Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Fakta ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Edupar masih belum merata, karena konsentrasi kegiatan cenderung terfokus pada wilayah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan. Kondisi tersebut menggambarkan adanya ketimpangan akses dan kesempatan bagi lembaga pendidikan di luar Pulau Jawa untuk memperoleh manfaat dari program edukasi ini, padahal secara konseptual Program Edukasi Parlemen ditujukan bagi seluruh generasi muda di Indonesia tanpa batasan geografis.

Berdasarkan riset peneliti, Humas dan Pengelolaan Museum DPR RI sejauh ini tampak lebih fokus pada penggunaan media internal dalam upaya menyosialisasikan Program Kunjungan Edukasi Parlemen. Namun, belum terlihat adanya kolaborasi dengan pihak eksternal seperti media nasional, media lokal, platform media sosial, maupun lembaga pendidikan di berbagai daerah. Kondisi ini menyebabkan informasi mengenai Program Kunjungan Edukasi Parlemen belum

tersebar secara merata, terutama di wilayah luar Pulau Jawa. Padahal, menjalin kemitraan dengan berbagai pihak eksternal berpotensi memperluas jangkauan informasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan Kunjungan Edukasi Parlemen.

Selain pemanfaatan media sosial, aktivitas komunikasi Humas dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI dalam menyosialisasikan Program Kunjungan EduPar juga masih didominasi oleh saluran komunikasi internal lembaga. Berdasarkan temuan peneliti, keterlibatan pihak eksternal seperti media lokal, media nasional, platform digital eksternal, maupun lembaga pendidikan di berbagai daerah belum terlihat secara optimal.

Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya jangkauan informasi Program Kunjungan EduPar, khususnya bagi generasi muda di luar Pulau Jawa. Padahal, kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal berpotensi memperluas penyebaran informasi, memperkuat pesan edukatif, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program tersebut. Media lokal, misalnya, memiliki peran strategis sebagai sarana edukasi dan jembatan komunikasi antara lembaga negara dan masyarakat di daerah (Djufri Rahim et al., 2024).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, masih terdapat pelajar dan mahasiswa di luar Pulau Jawa yang belum mengetahui maupun memahami keberadaan Program Kunjungan Edukasi Parlemen. Ketidakmerataan informasi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam akses pendidikan politik serta partisipasi masyarakat, yang sejatinya menjadi tujuan utama dari aktivitas program sosialisasi. Program Kunjungan Edukasi Parlemen memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan *media relation*, sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan kewajiban lembaga negara untuk menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi Humas dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI dalam menyosialisasikan Program Kunjungan Edukasi Parlemen perlu dievaluasi secara komprehensif. Evaluasi tidak hanya diperlukan untuk menilai aspek teknis pelaksanaan kegiatan, tetapi juga untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas komunikasi yang dilakukan telah mampu menjangkau sasaran secara efektif, merata, serta memberikan dampak pembelajaran kepada peserta. Evaluasi program pada instansi pemerintah mempunyai peran penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan komunikasi publik dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan program (Cangara, 2014).

Urgensi evaluasi tersebut semakin menguat mengingat rendahnya pemahaman dan minat sebagian generasi muda terhadap lembaga legislatif, yang berpotensi mempengaruhi citra DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Aktivitas komunikasi yang tidak menjangkau sasaran secara optimal dapat berdampak pada terbatasnya akses informasi dan rendahnya partisipasi publik, khususnya dari wilayah di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan aktivitas komunikasi dalam sosialisasi Program Kunjungan Edukasi Parlemen, termasuk tantangan yang dihadapi serta dampaknya terhadap peningkatan pengetahuan dan minat generasi muda.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam aktivitas komunikasi Humas dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI

dalam menyosialisasikan Program Kunjungan Edukasi Parlemen melalui pendekatan evaluatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pelaksanaan aktivitas komunikasi publik yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Evaluasi Aktivitas Komunikasi Humas dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI dalam Menyosialisasikan Program Kunjungan Edukasi Parlemen.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana aktivitas komunikasi Humas dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI dalam menyosialisasikan Program Kunjungan Edukasi Parlemen?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan aktivitas komunikasi Humas dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI dalam menyosialisasikan Program Kunjungan Edukasi Parlemen.
2. Untuk menganalisis evaluasi aktivitas komunikasi Humas dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI dalam menyosialisasikan Program Kunjungan Edukasi Parlemen.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan pemahaman mendalam terhadap kajian ilmu komunikasi dalam bidang *Public Relation* terutama bahasan mengenai evaluasi aktivitas program *Government Public Relation*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Humas dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI dalam meningkatkan profesionalisme kerja melalui aktivitas komunikasi yang lebih tepat dan lebih efektif dalam menyosialisasikan Program Kunjungan Edukasi Parlemen serta menjadi referensi untuk pengembangan program agar lebih optimal hingga berkontribusi dalam peningkatan citra DPR RI. Penelitian ini juga dapat menambah literatur dan wawasan peneliti maupun pembaca mengenai evaluasi dan aktivitas komunikasi dalam program kehumasan pemerintahan.

